



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SYIAH KUALA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HIZIR
2. Jabatan : WAKIL REKTOR IV
3. NHK : 277424

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 833.227.500

1. Tanah dan Bangunan Seluas 299 m²/128 m² di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 693.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 484 m²/75 m² di ACEH BESAR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 117.127.500
3. Tanah Seluas 4552 m² di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 23.100.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 109.323.800

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 1.620.000
3. LAINNYA, PACIFIC SEPEDA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 980.000
4. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 16.723.800

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 167.836.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 296.125.433

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.406.512.733

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.406.512.733



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.